



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 433, 2014

KEMENKEU. Tunjangan Profesi. Guru. PNS
Daerah. 2014. Alokasi. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/PMK.07/2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disebut TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013.
- (2) TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 tidak termasuk untuk bulan ke-13 (ketiga belas).

Pasal 2

- (1) Alokasi TP Guru PNSD adalah sebesar Rp56.136.316.551.000,00 (lima puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- (2) Alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan kurang bayar TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.
- (3) Alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sisa dana TP Guru PNSD yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tahun 2013.
- (4) Kurang bayar TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa dana TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (5) Alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian alokasi TP Guru PNSD ditetapkan berdasarkan data kebutuhan TP Guru PNSD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil rekonsiliasi data Guru PNSD dengan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rincian alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) TP Guru PNSD merupakan komponen Anggaran Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- (2) TP Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).
- (3) TP Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014.
- (4) TP Guru PNSD Tahun Anggaran sebelumnya yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah menjadi sumber pendanaan untuk pembayaran TP Guru PNSD

Pasal 4

- (1) Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara Triwulanan, yaitu:
 - a. Triwulan I paling lambat minggu terakhir bulan April 2014;
 - b. Triwulan II paling lambat minggu terakhir bulan Juni 2014;
 - c. Triwulan III paling lambat minggu terakhir bulan September 2014;
 - d. Triwulan IV paling lambat minggu terakhir bulan November 2014.
- (3) Penyaluran TP Guru PNSD Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penyaluran TP Guru PNSD Triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran 2013 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya TP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:
 - a. Triwulan I paling lambat pada bulan April 2014;
 - b. Triwulan II paling lambat pada bulan Juli 2014;
 - c. Triwulan III paling lambat pada bulan Oktober 2014;
 - d. Triwulan IV paling lambat pada bulan Desember 2014.
- (2) Pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (3) Daftar perhitungan pembayaran TP Guru PNSD dimuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal TP Guru PNSD yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak mencukupi kebutuhan pembayaran TP Guru PNSD, Pemerintah Daerah melakukan pembayaran kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan.
- (2) Dalam hal terdapat TP Guru PNSD setelah realisasi pembayaran TP Guru PNSD pada:
- Triwulan I, maka TP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran TP Guru PNSD Triwulan II;
 - Triwulan II, maka TP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran TP Guru PNSD Triwulan III; dan
 - Triwulan III, maka TP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran TP Guru PNSD Triwulan IV.
- (3) Dalam hal terdapat TP Guru PNSD setelah realisasi pembayaran TP Guru PNSD Triwulan IV dan terdapat kondisi sebagai berikut:
- seluruh Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD telah menerima pembayaran TP Guru PNSD; atau
 - Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD belum menerima pembayaran TP Guru PNSD baik sebagian maupun seluruhnya,

maka TP Guru PNSD tersebut tidak disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Negara.

- (4) TP Guru PNSD yang tidak disetorkan sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut akan diperhitungkan dengan alokasi TP Guru PNSD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD secara semesteran kepada:
- Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar; dan
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
- (2) Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada:
- a. minggu pertama bulan Agustus 2014 untuk Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester I; dan
 - b. minggu pertama bulan April 2015 untuk Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester II.
- (3) Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran TP Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya;
 - b. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran TP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya; dan
 - c. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD per semester.
- (4) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD namun belum menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Format Rekapitulasi Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan melaksanakan rekonsiliasi data jumlah realisasi pembayaran TP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD pada tahun 2014.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (3) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Gaji pokok Guru PNSD yang menjadi dasar pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014;
 - b. Jumlah pembayaran TP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima TP Guru PNSD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2014 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya;
 - c. Jumlah pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya;
 - d. Perhitungan TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) setelah pembayaran TP Guru PNSD Triwulan IV Tahun Anggaran 2013;
 - e. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 beserta jumlah kebutuhan pembayarannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014;
 - f. Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 namun belum menerima pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 baik sebagian maupun seluruhnya beserta jumlah pembayarannya;
 - g. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2015 beserta jumlah kebutuhan

- pembayarannya sampai dengan akhir tahun 2015; dan
- h. Daftar rencana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.
- (4) Format perhitungan TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format daftar rencana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rencana alokasi TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan rencana alokasi TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 10

Pemerintah Daerah penerima TP Guru PNSD yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi penundaan penyaluran TP Guru PNSD Triwulan II Tahun Anggaran 2015.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran TP Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PELATIHAN KEGIATAN KELUARGA REPUBLIC
NOMOR: G.1 /PMK.07/2014 TERTANG PEGOWAN UNTUK
NEGARA SUPER DAN RAKYAT DENGAN PERENCANAAN
KABUPATEN, DIAN KOTA TAHRUN ANGGARAN 2014.

**PECAWAII NEGRI SAPI DAERAH PROVINSI KABUPATEN, DAN KOTA
TAHRUN ANGGARAN 2014**

NO	DAERAH	KECURANGAN PEMBAYARAN TP. GURU PNID	SSISA DANA TP. GURU PNID DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TENWULAN I	PENYALURAN TENWULAN II	PENYALURAN TENWULAN III	PENYALURAN TENWULAN IV	JUMLAH	(dalam rupiah)
1	Provinsi Aceh								
2	Kab. Aceh Barat	-	212.289.310,3	17.476.179,000	17.690.462,000		17.690.462,000	70.549.565,000	
3	Kab. Aceh Besar	11.465.033,000	23.601.116,750	26.739.622,000	26.739.622,000			103.920.408,000	
4	Kab. Aceh Selatan	7.308.189,700	10.942.336,102,00	16.206.617,000	19.840.788,000	19.840.788,000	19.840.788,000	75.728.981,000	
5	Kab. Aceh Singkil	7.585.450,500	491.378.159,0	7.472.223,000	7.205.151,000	7.205.151,000	7.205.151,000	29.087.676,000	
6	Kab. Aceh Tengah	5.408.408,620	1.4.580.185,000	15.616.308,000	15.616.309,000	15.616.309,000	15.616.309,000	61.529.072,000	
7	Kab. Aceh Tenggara	5.482.204,621	3.329.791.501	8.540.301,000	11.321.888,000	11.321.888,000	11.321.888,000	42.505.945,000	
8	Kab. Aceh Timur	4.622.517,722	6.256.148,500	12.975.005,000	18.778.635,000	18.778.635,000	18.778.635,000	69.210.910,000	
9	Kab. Aceh Utara	9.491.996,100	33.269.511,450	30.535.032,000	34.312.948,000	34.312.948,000	34.312.948,000	133.473.876,000	
10	Kab. Bireuen	14.004.765,820	33.791.704,680	32.355.992,000	32.143.871,000	32.143.871,000	32.143.871,000	128.788.515,000	
11	Kab. Pidie	13.033.288,400	21.091.120,82,0	23.802.277,000	31.880.410,000	31.880.410,000	31.880.410,000	119.383.507,000	
12	Kab. Sinjai	-	60.3.165.464,	7.671.013,000	8.274.179,000	8.274.179,000	8.274.179,000	32.493.550,000	
13	Kota Banda Aceh	32.570.313,229	20.778.510,074,	22.571.654,000	30.786.650,000	30.786.650,000	30.786.650,000	114.931.514,000	
14	Kota Sabang	-	1.707.621.199	3.667.097,000	5.374.719,000	5.374.719,000	5.374.719,000	19.791.254,000	
15	Kota Langsa	5.983.961,400	5.753.858,83,0	17.877.655,000	17.647.552,000	17.647.552,000	17.647.552,000	70.820.311,000	
16	Kota Labuhanbatu	31.819.181,273	16.456.701,000	16.697.090,000	16.697.090,000	16.697.090,000	16.697.090,000	66.447.971,000	
17	Kab. Gayo Lues	2.924.111,000	1.816.735.585,	8.510.850,000	7.503.174,000	7.503.174,000	7.503.174,000	31.320.072,000	
18	Kab. Aceh Barat Daya	4.562.107,320	5.706.126,829,	13.356.287,000	14.500.287,000	14.500.287,000	14.500.287,000	56.557.128,000	
19	Kab. Aceh Jaya	12.386.117	10.869.718,600	-	2.723.808,000	6.903.447,000	6.903.447,000	16.530.702,000	
20	Kab. Nagan Raya	6.656.704,500	2.428.804,60,0	15.021.661,000	16.847.752,000	16.847.752,000	16.847.752,000	47.564.907,000	
21	Kab. Aceh Timang	6.094.787,400	8.931.999,770	13.503.389,000	16.311.104,000	16.311.104,000	16.311.104,000	62.327.203,000	
22	Kab. Bone Maris	3.371.609,600	5.737.916,04,0	7.83.927,000	10.205.234,000	10.205.234,000	10.205.234,000	38.354.629,000	
23	Kab. Pidie Jaya	17.966.958,600	2.659.724,91,0	26.385.673,000	3.250.673,000	3.250.673,000	3.250.673,000	38.354.629,000	
24	Kota Sabukit Salam	-	1.545.375,84,0	2.838.987,000	4.384.562,000	4.384.562,000	4.384.562,000	15.592.673,000	
25	Provinsi Sumatera Utara								
26	Kab. Asahan	9.088.669,600	3.846.282,37,0	4.1.728.285,000	36.485.868,000	36.485.868,000	36.485.868,000	151.185.859,000	
27	Kab. Deli	3.345.611,500	7.504.662,600	15.495.654,000	20.654.665,000	20.654.665,000	20.654.665,000	78.160.659,000	
28	Kab. Deli Serdang	22.076.062,000	29.073.328,83,7	76.620.517,000	76.836.488,000	76.836.488,000	76.836.488,000	307.279.981,000	
29	Kab. Tanah Karo	184.307.800	4.054.634.468,	24.929.278,000	28.799.904,000	28.799.904,000	28.799.904,000	111.329.290,000	
30	Kab. Labuhan Batu	3.739.282,94,0	2.095.442,52,1	20.960.461,000	19.316.975,000	19.316.975,000	19.316.975,000	78.911.311,000	
31	Kab. Langkat	22.127.675,090	30.285.503.97,0	62.905.533,000	51.063.362,000	51.063.362,000	51.063.362,000	216.095.619,000	
32	Kab. Mandailing Natal	30.567.074,290	15.031.913.000	26.424.470,000	26.424.470,000	26.424.470,000	26.424.470,000	95.303.323,000	
33	Kab. Nias	-	9.923.281.298,	-	-	-	-	8.710.611,000	
34	Kab. Samosir	9.158.446,300	12.456.813.42,0	52.715.979,000	56.015.347,000	56.015.347,000	56.015.347,000	220.763.020,000	
35	Kab. Tapian Nulu Selatan	-	11.315.449.81,0	4.414.556,50,0	15.16.923,000	15.16.923,000	15.16.923,000	51.32.350,000	
36	Kab. Tapian Nulu	2.59.772,160	3.95.567,20,0	12.48.975,000	19.323.808,000	19.323.808,000	19.323.808,000	72.140.347,000	
37	Kab. Tapanuli Tengah	-	6.102.817.382,0	21.23.376.000	27.336.634,000	27.336.634,000	27.336.634,000	103.243.602,000	
38	Kab. Toba Samosir	-	4.057.557.83,9	26.63.129,000	30.690.978,000	30.690.978,000	30.690.978,000	118.705.054,000	
39	Kota Binjai	4.443.780,70,0	8.452.578,04,00	23.01.328,000	27.019.358,000	27.019.358,000	27.019.358,000	104.068.432,000	
40	Kota Medan	-	35.372.908,16,3	63.121.479,00	98.494.387,000	98.494.387,000	98.494.387,000	358.604.640,000	
41	Kota Pematangsiantar	56.341.290	3.87.375.93,0	35.92.008,000	35.92.008,000	35.92.008,000	35.92.008,000	143.508.797,000	
42	Kota Sibolga	-	3.95.567,20,0	12.48.975,000	12.884.642,000	12.884.642,000	12.884.642,000	53.1.142.801,000	
43	Kota Tanjung Balai	3.468.384,90,0	1.409.839.31,0	13.188.677,000	11.130.131,000	11.130.131,000	11.130.131,000	46.519.070,000	
44	Kota Teluk Bayur	4.772.30,0	3.105.385.51,6	1.482.331,000	17.886.144,000	17.886.144,000	17.886.144,000	68.482.763,000	
45	Kota Padang Sidempuan	3.817.705,29,0	6.802.354.67,0	20.243.674,000	20.243.674,000	20.243.674,000	20.243.674,000	78.051.046,000	
46	Kab. Pidie Paitak Bharat	24.273.29,0	3.403.228,82,0	10.614.348,000	13.993.404,000	13.993.404,000	13.993.404,000	52.594.560,000	
47	Kab. Nias Selatan	3.004.891,20,0	11.119.879.52,3	16.043.850,000	11.829.060,000	11.829.060,000	11.829.060,000	51.531.010,000	

LAMUGONI I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 61/P/MK.07/2014 TENTANG PREDOMINAN UNIKU
DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PROVINSI
NEGARA SIFIL DAERAH GEPADA
DAERAH PROVINSI
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN
ANGGARAN 2014

**KINCLONG ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	DAERAH	KECERDASAN PENGETAHUAN TP GURU PNID	SISA DANA REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
								(dalam rupiah)
48	Kab. Humbang Hasundutan	3.185.650,240	30.623.448.920,00	1.4.444.415,000	21.682.113,000	21.682.113,000	21.682.113,000	80.090.754,000
49	Kab. Samosir Bedagai	6.897.281,900	4.057.857.819,00	3.1.428.228,000	33.002.935,000	33.002.935,000	33.002.935,000	130.15.105.300,000
50	Kab. Samosir	3.720.375,600	3.441.803,460	10.218.555,000	13.685.684,000	13.685.684,000	13.685.684,000	51.278.607,000
51	Kab. Batubara	-	4.885.121.765	20.713.114,000	20.434.641,000	20.434.641,000	20.434.641,000	82.017.037,000
52	Kab. Padang Lawas	-	5.813.091,000	10.728.603,000	10.728.603,000	10.728.603,000	10.728.603,000	38.028.900,000
53	Kab. Padang Lawas Utara	-	3.321.513,801	6.015.483,000	9.268.243,000	9.268.243,000	9.268.243,000	33.829.192,000
54	Kab. Labuhan Batu Selatan	-	8.029.507,000	12.351.026,000	12.351.026,000	12.351.026,000	12.351.026,000	45.082.567,000
55	Kab. Labuhan Batu Utara	2.708.567,449	2.217.055,442	1.6.571.165,000	16.079.653,000	16.079.653,000	16.079.653,000	64.810.124,000
56	Kab. Nias Utara	-	3.111.627.918	2.261.681,000	3.273.306,000	3.273.306,000	3.273.306,000	18.181.605,000
57	Kab. Nias Barat	4.164.455,000	3.163.596,926	5.382.760,000	6.130.002,000	6.130.002,000	6.130.002,000	23.272.766,000
58	Kota Gunung Sitoli	1.582.479,200	4.588.590,000	8.991.519,000	11.997.630,000	11.997.630,000	11.997.630,000	44.284.409,000
59	Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
60	Kab. Limapuluh Kota	7.157.765,107	14.320.646,542	27.875.987,000	35.138.866,000	35.138.866,000	35.138.866,000	133.392.591,000
61	Kab. Agam	13.219.360,975	3.1.31.747,750	46.125.336,000	46.125.336,000	46.125.336,000	46.125.336,000	169.488.753,000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	36.640,800	4.578.266,600	-	-	-	-	3.855.074,000
63	Kab. Padang Panjang	14.551.448,400	3.518.571,645	39.184.432,000	38.151.256,000	38.151.256,000	38.151.256,000	153.638.200,000
64	Kab. Pasaman	2.234.211	2.232,000	25.244.274,000	25.244.274,000	25.244.274,000	25.244.274,000	97.504.144,000
65	Kab. Pasaman Selatan	16.443.320,400	31.193.322,000	35.659.030,000	35.639.030,000	35.639.030,000	35.639.030,000	138.110.402,000
66	Kab. Sijunjung	6.105.145,050	31.239.404,720	11.611.132,000	16.745.391,000	16.745.391,000	16.745.391,000	61.847.305,000
67	Kab. Solok	15.755.811,724	25.694.580,265	33.657.650,000	33.618.019,000	33.618.019,000	33.618.019,000	134.33.707,000
68	Kab. Tanah Datar	26.594.593,800	19.04.593,000	38.854.318,000	38.854.318,000	38.854.318,000	38.854.318,000	135.557.966,000
69	Kota Buitenzorg	3.280.705,600	8.837.711,600	11.037.660,000	16.594.666,000	16.594.666,000	16.594.666,000	60.821.368,000
70	Kota Padang Panjang	2.432.134,600	7.667.833,580	3.518.567,000	8.754.266,000	8.754.266,000	8.754.266,000	29.781.305,000
71	Kota Padang	9.120.404,405	-	9.412.377,000	76.282.216,000	76.282.216,000	76.282.216,000	323.050.825,000
72	Kota Payakumbuh	3.723.701,205	9.849.043,920	10.222.992,000	16.348.334,000	16.348.334,000	16.348.334,000	59.267.994,000
73	Kota Simeulue	15.623.440,000	8.175.756,100	2.579.567,000	10.598.545,000	10.598.545,000	10.598.545,000	34.375.227,000
74	Kota Solok	7.759.793,700	4.095.362,000	11.665.177,000	11.665.177,000	11.665.177,000	11.665.177,000	39.090.893,000
75	Kota Padangpanjang	6.577.580,028	20.350.249,000	24.070.043,000	24.070.043,000	24.070.043,000	24.070.043,000	92.260.378,000
76	Kab. Pasaman Barat	15.094.197,000	7.318.270,023	28.700.249,000	20.924.322,000	20.924.322,000	20.924.322,000	91.473.215,000
77	Kab. Dharmasraya	7.373.140,320	7.800.728,940	7.924.123,000	14.331.712,000	14.331.712,000	14.331.712,000	50.979.259,000
78	Kab. Solok Selatan	4.393.364,600	4.990.539,380	11.902.167,000	12.499.342,000	12.499.342,000	12.499.342,000	49.100.193,000
79	Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-
80	Kab. Bengkalis	8.420.158,100	15.235.633,430	18.637.412,000	25.452.887,000	25.452.887,000	25.452.887,000	94.995.073,000
81	Kab. Indragiri Hilir	5.619.047,200	10.964.004,439	17.003.268,000	22.348.225,000	22.348.225,000	22.348.225,000	84.047.933,000
82	Kab. Indragiri Hulu	10.875.734,700	7.294.265,400	31.916.490,000	28.335.021,000	28.335.021,000	28.335.021,000	116.921.553,000
83	Kab. Kampar	7.509.311,800	21.337.793,400	25.79.154,000	39.618.605,000	39.618.605,000	39.618.605,000	144.645.939,000
84	Kab. Kuantan Singing	9.575.520,500	10.516.167,700	22.372.405,000	23.113.601,000	23.113.601,000	23.113.601,000	91.513.208,000
85	Kab. Pelalawan	-	5.275.436,223	8.794.122,840	13.999.067,000	13.999.067,000	13.999.067,000	50.472.832,000
86	Kab. Rokan Hilir	1.719.601,900	8.068.933,540	14.307.490,000	18.555.050,000	18.555.050,000	18.555.050,000	42.101.009,000
87	Kab. Siak	6.119.633,700	6.748.559,560	15.902.334,000	16.531.060,000	16.531.060,000	16.531.060,000	69.740.050,000
88	Kota Duri	6.162.007,653	7.872.189,220	16.174.914,000	17.885.095,000	17.885.095,000	17.885.095,000	69.830.199,000
89	Kota Lubuk Linggau	22.674.014,480	21.745.591,320	48.896.850,000	48.170.295,000	48.170.295,000	48.170.295,000	193.809.755,000
90	Kab. Pelalawan	36.370,800	6.103.499,329	5.029.828,000	11.096.987,000	11.096.987,000	11.096.987,000	38.320.819,000
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-
92	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
93	Kab. Natuna	-	2.776.225,420	1.4.994.530,000	17.770.756,000	17.770.756,000	17.770.756,000	68.306.798,000

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 /PMK.07 /2014 TENTANG PENDIDIKAN UMUM DAN ALOKASI TUNJUNGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DABATU PROYNTSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

NO	DAERAH	KECERDASAN PENGETAHUAN DILAKUKAN PADA TIP GURU DAN PNSD DI REKAM KAS DARI MONEVRAH	PENYALURAN TERWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	(dalam ribuan)
			JUMLAH				
139	Kab. Bandung Selatan	7.028.3102.400	8.487.454.160	17.657.818.000	19.135.168.000	19.135.169.000	19.135.169.000
140	Kab. Bengkulu Utara	10.613.661.200	8.230.704.150	22.336.990.000	19.933.993.000	19.935.993.000	19.935.993.000
141	Kab. Bogor, Lebong	7.203.0105.800	7.454.009.000	25.491.154.000	25.491.154.000	25.491.154.000	25.491.154.000
142	Kota Bengkulu	13.834.046.200	10.280.125.335	43.522.329.000	39.969.374.000	39.969.374.000	39.969.374.000
143	Kab. Karau	3.391.927.700	2.264.200.334	9.830.072.000	8.702.345.000	8.702.345.000	8.702.345.000
144	Kab. Seluma	7.399.049.028	5.290.598.212	14.448.699.000	12.184.609.000	12.184.609.000	12.184.609.000
145	Kab. Mukomuko	-	1.739.743.156	12.691.173.000	14.574.270.000	14.574.270.000	14.574.270.000
146	Kab. Lebong	-	4.051.951.628	8.411.087.000	12.471.018.000	12.471.018.000	12.471.018.000
147	Kab. Kepahiang	3.073.750.590	6.520.810.020	6.311.498.000	12.526.358.000	12.526.358.000	12.526.358.000
148	Kab. Bengkulu Tengah	5.990.485.900	4.871.815.265	11.909.557.000	10.790.886.000	10.790.886.000	10.790.886.000
149	Provinsi Lampung	-	-	-	-	-	-
150	Kab. Lampung Barat	4.227.839.800	9.905.280.180	8.817.471.000	14.494.912.000	14.494.912.000	14.494.912.000
151	Kab. Lampung Selatan	16.619.435.320	18.835.449.355	3.644.577.000	40.660.690.000	40.660.690.000	40.660.690.000
152	Kab. Lampung Tengah	14.720.780.280	48.672.991.525	3.7167.317.000	71.119.459.000	71.119.459.000	71.119.459.000
153	Kab. Lampung Utara	-	-	46.149.781.000	46.149.781.000	46.149.781.000	46.149.781.000
154	Kab. Lampung Timur	38.941.700	4.049.810.760	57.820.657.000	61.831.522.000	61.831.522.000	61.831.522.000
155	Kab. Tanggamus	32.391.951.100	16.657.701.620	27.044.832.000	31.306.982.000	31.306.982.000	31.306.982.000
156	Kab. Tulang Bawang	98.950.200	6.904.488.249	8.868.604.000	15.674.142.000	15.674.142.000	15.674.142.000
157	Kab. West Kalimantan	15.323.690	8.071.614.870	12.201.591.000	20.246.612.000	20.246.612.000	20.246.612.000
158	Kota Bandar Lampung	-	6.719.667.380	57.502.673.000	64.222.540.000	64.222.540.000	64.222.540.000
159	Kota Metro	8.593.128.200	31.391.398.330	16.928.229.000	19.326.499.000	19.326.499.000	19.326.499.000
160	Kab. Pesawaran	10.334.350	9.847.372.350	24.604.996.000	24.118.268.000	24.118.268.000	24.118.268.000
161	Kab. Pringsewu	22.415.031.490	14.813.910.455	43.208.152.000	35.608.031.000	35.608.031.000	35.608.031.000
162	Kab. Mesui	-	1.881.376.416	7.034.104.000	8.915.481.000	8.915.481.000	8.915.481.000
163	Kab. Tulang Bawang Barat	2.996.932.590	5.690.280.070	12.310.519.000	14.775.867.000	14.775.867.000	14.775.867.000
164	Kab. Pesawaran Barat	-	-	8.776.773.000	8.776.773.000	8.776.773.000	8.776.773.000
165	Provinsi DKI Jakarta	163.082.365.785	21.9.070.077.705	4.01.378.716.000	4.877.366.428.000	4.877.366.428.000	4.877.366.428.000
166	Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
167	Kab. Bandung	55.011.887.490	29.937.132.00	14.9.757.104.000	124.682.350.000	124.682.350.000	124.682.350.000
168	Kab. Bekasi	30.872.065.700	16.1.657.104.000	61.928.126.000	61.928.126.000	61.928.126.000	61.928.126.000
169	Kab. Bogor	51.002.246.100	41.667.36.900	124.282.523.000	111.948.014.000	111.948.014.000	111.948.014.000
170	Kab. Ciamis	68.1.25.018.840	63.805.668.510	79.504.022.000	75.184.772.000	75.184.772.000	75.184.772.000
171	Kab. Cirebon	58.898.817.310	51.881.1574.810	9.9.522.628.000	86.508.385.000	86.508.385.000	86.508.385.000
172	Kab. Cirimekar	172	10.822.16.16.3	10.965.393.000	90.1.68.169.000	90.1.68.169.000	90.1.68.169.000
173	Kab. Garut	36.174.385.700	132.356.428.000	120.996.785.000	120.996.785.000	120.996.785.000	120.996.785.000
174	Kab. Indramayu	22.907.277.250	32.526.299.800	81.4.82.700.000	71.0.1.1.723.000	71.0.1.1.723.000	71.0.1.1.723.000
175	Kab. Karawang	79.574.911.490	99.800.487.000	86.9.42.698.000	86.9.42.698.000	86.9.42.698.000	86.9.42.698.000
176	Kab. Karawang Barat	25.479.586.756	8.24.2.256.756	86.5.79.2.892.000	69.556.563.000	69.556.563.000	69.556.563.000
177	Kab. Majalengka	26.925.499.180	37.524.731.300	77.04.243.000	67.639.475.000	67.639.475.000	67.639.475.000
178	Kab. Purwakarta	19.702.481.290	48.306.185.000	48.021.302.000	48.021.302.000	48.021.302.000	48.021.302.000
179	Kab. Salabam	27.818.263.450	17.563.087.900	75.674.910.000	75.674.910.000	75.674.910.000	75.674.910.000
180	Kab. Sumedang	35.018.804.500	29.286.104.221	89.951.997.000	83.219.297.000	83.219.297.000	83.219.297.000
181	Kab. Sukabumi	33.212.262.800	29.627.582.577	67.956.800.000	63.983.299.000	63.983.299.000	63.983.299.000
182	Kab. Tegal	40.779.770.520	34.729.197.070	107.322.343.000	101.271.770.000	101.271.770.000	101.271.770.000
183	Kota Bandung	68.856.803.810	67.661.072.655	125.267.177.000	125.267.177.000	125.267.177.000	125.267.177.000
184	Kota Bekasi	30.083.147.300	23.229.420.111	68.147.383.000	61.293.656.000	61.293.656.000	61.293.656.000

LAPORAN I
DEPUTI KONSEP KELALOAN REPUBLIK
INDONESIA PTSP/C/07/2014 TENTANG PEGAWAI NEGERI SERTIFIKAT TUNJANGAN PROFESSIONAL GURU
NEGERI SIPS/DAERAH GEDUNG DILAKUKAN DI
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIUNG I
DEPUTI GURU KEGURUAN KELUARGAAN REPUBLIK
INDONESIA ELEPPIK 07/2014 TENTANG PENDIDIKAN, PEGAWAI
DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PROVINSI
NEGARA SIFIL DAERAH GEDA DAERAH PROVINSI
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

**KINCLONG ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGRI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

(dalam ribuan)						
NO	DAERAH	KEDUDUKAN PENGARAHAN TIP CATURAYAN PNSD DI REAKTAN KAS DARI MEREKA	PENYALURAN TERWULAN I	PENYALURAN TERWULAN II	PENYALURAN TERWULAN III	PENYALURAN TERWULAN IV
185	Kota Bogor	14.093.010.789	41.667.736.957	19.07.3.845.000	45.808.572.000	45.808.572.000
186	Kota Cilegon	11.265.327.490	7.637.100.475	40.676.162.000	37.047.935.000	37.047.935.000
187	Kota Depok	10.631.647.900	21.683.203.050	46.243.651.000	46.243.651.000	46.243.651.000
188	Kota Sukabumi	10.061.647.900	4.614.449.871	28.065.291.000	22.618.033.000	22.618.033.000
189	Kota Tangerang	24.242.293.303	7.245.556.620	68.522.051.000	51.525.314.000	51.525.314.000
190	Kota Cimahi	38.07.200.132	38.07.192.000	34.475.027.000	34.475.027.000	34.475.027.000
191	Kota Bandar	4.424.439.920	6.627.931.720	17.80.497.000	20.003.982.000	20.003.982.000
192	Kab. Bandung Barat	32.925.879.490	13.849.514.021	81.007.339.000	61.930.974.000	77.812.464.000
193	Kab. Pangandaran	-	-	35.125.481.000	61.930.974.000	266.800.261.000
194	Provinsi Banten	-	-	35.125.481.000	35.125.481.000	140.501.924.000
195	Kab. Lebak	22.419.604.800	15.307.999.590	50.547.621.000	52.436.016.000	52.436.016.000
196	Kab. Pandeglang	20.913.080.700	21.929.288.280	61.207.293.000	57.223.503.000	57.223.503.000
197	Kab. Serang	15.071.479.900	20.724.118.000	43.798.127.000	49.421.065.000	49.421.065.000
198	Kab. Tanggamus	12.721.618.040	20.448.779.144	40.849.080.000	58.576.051.000	58.576.051.000
199	Kota Cilegon	3.209.567.820	6.083.751.010	36.322.483.000	36.202.483.000	36.202.483.000
200	Kota Tangerang	20.581.294.600	20.162.713.723	53.266.061.000	53.547.501.000	53.547.501.000
201	Kota Serang	31.316.680.395	4.4820.591.276	22.784.002.000	29.287.713.000	29.287.713.000
202	Kota Tangerang Selatan	10.390.472.900	19.967.974.880	19.895.016.000	29.472.518.000	29.472.518.000
203	Provinsi Jawa Tengah	-	-	34.381.065.000	58.246.865.000	58.246.865.000
204	Kab. Banjarnegara	24.255.486.300	18.121.286.345	50.550.152.21	86.934.581.000	86.934.581.000
205	Kab. Banyumas	10.213.978.600	50.361.017.100	56.513.101.000	45.101.893.000	45.101.893.000
206	Kab. Batang	15.236.017.200	29.819.566.720	51.518.544.000	64.151.946.000	64.151.946.000
207	Kab. Blora	15.069.566.000	24.780.782.544	51.544.059.000	69.434.133.000	69.434.133.000
208	Kab.Boyolali	28.784.996.400	47.844.551.900	50.542.879.000	72.224.094.000	72.224.094.000
209	Kab. Brebes	11.572.200	65.572.500.089	56.563.165.000	86.116.261.000	86.116.261.000
210	Kab. Cilacap	15.934.323.300	45.066.210.115	56.983.724.000	50.907.030.000	50.907.030.000
211	Kab. Demak	21.788.696.600	29.207.115.471	43.458.611.000	60.800.591.000	60.800.591.000
212	Kab. Grobogan	30.460.300.634	44.823.533.095	36.633.558.000	40.456.254.000	40.456.254.000
213	Kab. Jepara	-	31.623.051.921	28.833.202.000	42.182.647.000	42.182.647.000
214	Kab. Karanganyar	26.753.547.160	40.649.686.865	52.198.658.000	65.694.798.000	65.694.798.000
215	Kab. Kebumen	12.605.356.447	61.532.423.000	61.605.492.000	69.293.852.000	69.293.852.000
216	Kab. Kendal	10.871.924.640	41.742.172.000	57.846.849.000	57.846.849.000	57.846.849.000
217	Kab. Kluren	38.831.418.300	43.188.522.000	88.070.743.000	88.070.743.000	88.070.743.000
218	Kab. Kudus	14.451.616.427	21.556.236.272	41.152.066.000	42.182.647.000	42.182.647.000
219	Kab. Madiun	19.914.547.160	27.006.210.012	42.155.083.000	59.888.346.000	59.888.346.000
220	Kab. Pati	30.355.384.470	40.332.884.870	61.708.688.000	71.466.891.000	71.466.891.000
221	Kab. Pelalawan	29.719.344	31.183.124.000	50.941.830.000	50.941.830.000	50.941.830.000
222	Kab. Pemalang	12.583.472.700	40.622.844.000	65.887.190.000	65.887.190.000	65.887.190.000
223	Kab. Purworejo	15.998.173.120	24.305.941.195	37.072.025.000	45.379.694.000	45.379.694.000
224	Kab. Purworejo	14.451.616.427	37.226.212.177	34.403.459.000	57.176.084.000	57.176.084.000
225	Kab. Rembang	16.774.111.300	25.628.134.300	51.563.729.000	60.417.752.000	60.417.752.000
226	Kab. Semarang	32.711.859.022	26.202.415.000	47.868.715.000	47.868.715.000	47.868.715.000
227	Kab. Slahut	11.045.559.718	52.397.148.421	47.357.249.000	71.918.651.000	71.918.651.000
228	Kab. Suboharjo	28.056.137.040	27.961.144.907	53.195.094.000	53.155.094.000	53.155.094.000
229	Kab. Trenggalek	22.665.620.300	20.470.719.737	61.112.187.500	58.926.734.000	58.926.734.000
230	Kab. Temanggung	1.517.4.497.200	6.765.172.360	49.794.872.000	54.963.446.000	54.963.446.000
231	Kab. Wonosari	48.102.702.760	51.730.851.000	84.659.057.000	84.659.057.000	84.659.057.000

**RINGKAS ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	DAERAH	KEKURANGAN PENGELUARAN TP.GURU DAN UMUM DILAKUKAN		PENGELUARAN TRIWULAN I	PENGELUARAN TRIWULAN II	PENGELUARAN TRIWULAN III	PENGELUARAN TRIWULAN IV
		PPSD DILAKUKAN	KAS PNSD DILAKUKAN				JUMLAH
232	Kab. Wonosobo	10.325.738.900	13.640.239.960	38.773.144.000	43.065.941.000	43.065.941.000	1.679.49.263.000
233	Kota Magelang	10.772.649.400	13.868.510.820	16.324.649.000	19.420.510.000	19.420.510.000	74.861.179.000
234	Kota Pekalongan	4.018.35.600	11.471.21.19.765	17.385.293.000	24.194.107.000	24.194.107.000	91.911.244.000
235	Kota Salatiga	-	8.385.947.460	12.070.605.000	20.456.553.000	20.456.553.000	73.440.265.000
236	Kota Semarang	15.827.908.900	14.205.450.586	48.946.219.000	78.323.760.000	78.323.760.000	283.917.499.000
237	Kota Surakarta	43.522.800	48.138.453.000	56.500.005.000	56.500.005.000	56.500.005.000	207.638.508.000
238	Kota Yogyakarta	9.236.701.600	10.440.869.030	18.981.726.000	20.095.903.000	20.095.903.000	79.179.455.000
239	Provinsi DI Yogyakarta						
240	Kab. Bantul	37.399.230.300	46.968.620.264	41.477.369.000	73.046.779.000	73.046.779.000	260.617.726.000
241	Kab. Gunung Kidul	6.593.1021.165	27.176.402.250	26.324.668.000	56.910.107.000	56.910.107.000	197.044.989.000
242	Kab. Kulon Progo	1.747.900.600	23.502.025.000	23.602.025.000	49.775.924.000	49.775.924.000	172.929.797.000
243	Kab. Sleman	4.12.605.050	28.464.847.450	28.464.847.450	73.458.892.000	73.458.892.000	248.733.205.000
244	Kota Yogyakarta	3.107.422.900	23.584.843.060	33.011.706.000	51.489.189.000	51.489.189.000	187.479.345.000
245	Provinsi Jawa Timur						
246	Kab. Bangkalan	24.904.646.799	8.874.731.919	66.012.781.000	49.982.866.000	49.982.866.000	215.961.379.000
247	Kab. Banyuwangi	16.167.446.296	5.037.448.051	47.669.291.000	85.539.281.000	85.539.281.000	304.027.134.000
248	Kab. Blitar	55.060.04.1.050	55.060.04.1.050	82.771.917.000	85.755.229.000	85.755.229.000	3.40.037.604.000
249	Kab. Bojonegoro	56.117.677.700	60.423.042.080	65.875.947.000	65.875.947.000	65.875.947.000	258.333.837.000
250	Kab. Bondowoso	18.474.649.200	19.761.646.520	39.799.052.000	41.083.079.000	41.083.079.000	163.045.289.000
251	Kab. Gresik	14.317.627.205	22.770.780.330	45.550.559.000	55.003.713.000	55.003.713.000	211.561.699.000
252	Kab. Jember	51.942.207.400	6.193.1.000.756	10.231.000.756	10.231.000.756	10.231.000.756	410.845.931.000
253	Kab. Jombang	-	6.693.1.673.676	65.631.089.000	72.304.763.000	72.304.763.000	282.545.378.000
254	Kab. Kediri	45.161.918.305	45.198.912.649	77.486.455.000	79.523.459.000	79.523.459.000	3.16.036.852.000
255	Kab. Lamongan	41.201.023.820	57.732.010.000	68.638.894.000	68.638.894.000	68.638.894.000	263.654.692.000
256	Kab. Lumajang	10.971.270.700	26.925.291.520	52.459.652.000	58.449.582.000	58.449.582.000	217.844.398.000
257	Kab. Madura	21.626.597.350	22.966.937.078	47.813.616.000	52.159.085.000	52.159.085.000	204.295.871.000
258	Kab. Madiun	29.353.183.100	31.633.842.473	61.386.106.000	64.171.047.000	64.171.047.000	254.99.247.000
259	Kab. Magetan	16.104.955.700	12.282.059.959	12.444.611.33.000	10.856.399.000	10.856.399.000	451.015.310.000
260	Kab. Malang	71.871.813.300	52.282.059.959	124.253.029.000	59.219.979.000	59.219.979.000	59.219.979.000
261	Kab. Ngawi	31.917.568.500	51.582.287.830	58.805.933.000	78.471.433.000	78.471.433.000	294.220.262.000
262	Kab. Ngringin	26.978.476.200	35.197.684.000	65.007.842.000	65.007.842.000	65.007.842.000	250.221.162.000
263	Kab. Pacitan	24.425.3.08.400	33.731.015.800	36.376.412.000	47.684.319.000	47.684.319.000	163.440.759.000
264	Kab. Pamekasan	22.709.2.89.200	8.860.71.3.660	55.111.17.3.660	41.267.099.000	41.267.099.000	178.917.472.000
265	Kab. Pasuruan	34.824.628.630	33.817.34.500	56.019.696.000	64.012.411.000	64.012.411.000	257.056.929.000
266	Kab. Probolinggo	43.722.507.480	42.999.492.000	52.429.506.000	67.220.506.000	67.220.506.000	254.084.000.000
267	Kab. Probolinggo	26.974.847.600	24.999.438.600	46.411.3.565.000	51.609.608.000	51.609.608.000	51.609.608.000
268	Kab. Sampang	12.755.173.188	25.474.816.000	32.334.521.000	32.334.521.000	32.334.521.000	123.476.379.000
269	Kab. Sidrap	45.522.44.660	81.191.571.000	91.167.784.000	91.167.784.000	91.167.784.000	354.694.923.000
270	Kab. Situbondo	15.567.930.000	16.561.251.660	36.372.646.000	37.365.968.000	37.365.968.000	148.370.550.000
271	Kab. Sumenep	34.824.628.630	27.569.058.087	36.065.379.000	45.419.595.000	45.419.595.000	172.324.164.000
272	Kab. Trenggalek	22.145.94.26.3	22.145.94.26.3	70.457.421.000	73.054.264.000	73.054.264.000	289.829.21.3.000
273	Kab. Tulungagung	9.240.298.674	9.240.298.674	91.897.224.000	65.422.190.000	65.422.190.000	288.163.794.000
274	Kab. Tulungagung	35.715.3.32.273	15.281.497.600	71.867.948.000	80.671.762.000	80.671.762.000	313.883.234.000
275	Kota Blitar	7.816.17.55.900	8.987.279.19.9	16.421.158.000	17.591.681.000	17.591.681.000	69.196.291.000
276	Kota Kediri	9.586.764.810	4.688.229.94.0	32.722.642.000	27.828.442.000	27.828.442.000	1.16.22.12.523.000
277	Kota Malang	7.883.3.30.850	13.822.109.20.9	23.011.086.000	28.949.864.000	28.949.864.000	109.860.678.000
278	Kota Malang	10.890.926.890	36.373.029.000	51.292.743.000	51.292.743.000	51.292.743.000	190.251.258.000

(dalam rupiah)

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBANTUAN YANG TERSEDIA	SISA DANA TP. GURU PNSD DI RAKYAT KAS UMAUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	(dalam rupiah)	
								JUMLAH	
279	Kota Mojolerto	5.245.392.840	6.342.834.415	11.473.083.000	12.590.524.000	12.590.524.000	12.590.524.000	49.244.655.000	
280	Kota Panaruan	3.046.595.000	4.647.774.300	13.002.564.000	14.603.772.000	14.603.772.000	14.603.772.000	56.813.850.000	
281	Kota Probolinggo	5.422.974.260	7.748.392.920	19.775.155.372	22.106.174.000	22.106.174.000	22.106.174.000	86.059.277.000	
282	Kota Surabaya	38.262.753.320	17.551.555.372	127.585.144.000	106.904.187.000	106.904.187.000	106.904.187.000	448.297.975.000	
283	Kota Batu	2.478.953.800	3.908.669.200	14.013.695.000	13.443.412.000	13.443.412.000	13.443.412.000	54.343.932.000	
284	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
285	Kab. Bengkayang	4.635.073.300	6.245.910.155	8.043.485.800	9.655.715.000	9.655.715.000	9.655.715.000	37.011.003.000	
286	Kab. Landak	5.150.428.400	4.419.890.000	16.036.559.000	15.306.021.000	15.306.021.000	15.306.021.000	61.954.622.000	
287	Kab. Ketapang	3.445.868.600	5.303.198.936	11.165.313.000	13.012.643.000	13.012.643.000	13.012.643.000	50.193.242.000	
288	Kab. Kepraiang	6.833.920.500	9.981.130.440	13.268.315.000	16.372.525.000	16.372.525.000	16.372.525.000	62.385.890.000	
289	Kab. Pertianan	7.423.601.300	8.020.686.284	23.060.927.000	23.727.712.000	23.727.712.000	23.727.712.000	94.243.763.000	
290	Kab. Sambas	13.475.604.609	14.775.873.700	20.908.733.000	28.223.042.000	28.223.042.000	28.223.042.000	111.577.899.000	
291	Kab. Sanggau	7.932.276.000	5.151.056.600	22.780.966.000	20.009.747.000	20.009.747.000	20.009.747.000	82.810.207.000	
292	Kab. Siberut	6.304.928.600	2.525.267.577	19.160.548.000	15.400.857.000	15.400.857.000	15.400.857.000	65.363.119.000	
293	Kota Pontianak	-	4.209.971.370	29.848.566.000	34.058.538.000	34.058.538.000	34.058.538.000	132.024.180.000	
294	Kota Singkawang	5.428.426.500	5.359.892.200	14.907.533.4.000	14.907.3.000.000	14.907.3.000.000	14.907.3.000.000	59.697.754.000	
295	Kab. Sekadau	5.640.871.000	2.94.520.3.0	14.974.472.000	8.248.121.000	8.248.121.000	8.248.121.000	39.718.835.000	
296	Kab. Melawi	-	1.1.559.792.760	-	3.181.481.000	6.529.903.000	6.529.903.000	14.241.287.000	
297	Kab. Kayong Utara	2.16.196.910	3.137.958.000	3.353.754.000	3.353.754.000	3.353.754.000	3.353.754.000	13.198.830.000	
298	Kab. Kubu Raya	9.181.661.058	8.615.635.952	23.860.611.000	23.294.586.000	23.294.586.000	23.294.586.000	93.744.369.000	
299	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	
300	Kab. Barito Selatan	6.438.673.100	6.716.542.300	10.961.618.000	11.239.687.000	11.239.687.000	11.239.687.000	44.680.879.000	
301	Kab. Bantul Utara	2.473.748.460	3.225.948.440	8.661.973.000	9.443.994.000	9.443.994.000	9.443.994.000	36.993.775.000	
302	Kab. Kapuas	14.340.505.960	-	41.398.500.000	27.058.144.000	27.058.144.000	27.058.144.000	122.573.032.000	
303	Kab. Kotawaringin Barat	4.347.664.800	1.739.638.885	14.468.466.000	11.880.422.000	11.880.422.000	11.880.422.000	50.129.754.000	
304	Kab. Kotawaringin Timur	4.685.176.800	1.725.814.960	19.990.590.000	16.031.229.000	16.031.229.000	16.031.229.000	68.084.277.000	
305	Kota Palangka Raya	14.270.795.300	16.659.770.120	24.125.568.000	26.514.523.000	26.514.523.000	26.514.523.000	103.669.117.000	
306	Kab. Kotawaringin	-	4.322.664.000	8.549.699.000	8.549.699.000	8.549.699.000	8.549.699.000	29.971.751.000	
307	Kab. Seruyan	-	7.227.14.1200	-	1.418.230.000	4.430.753.000	4.430.753.000	10.279.736.000	
308	Kab. S卢kambara	-	1.3.390.454.900	-	-	-	-	-	
309	Kab. Lamandau	1.463.849.600	2.233.025.000	3.153.422.000	3.952.598.000	3.952.598.000	3.952.598.000	15.011.216.000	
310	Kab. Garutung Mas	-	572.972.200	6.667.957.000	7.240.929.000	7.240.929.000	7.240.929.000	28.390.74.000	
311	Kab. Palangka Raya	13.389.326.500	22.299.787.200	22.621.652.000	11.532.077.000	11.532.077.000	11.532.077.000	57.217.837.000	
312	Kab. Marang Raya	1.000.301.300	2.411.775.040	4.492.942.000	5.944.415.000	5.944.415.000	5.944.415.000	22.326.187.000	
313	Kab. Barito Timur	8.491.869.910	3.991.216.691	14.270.645.000	9.769.992.000	9.769.992.000	9.769.992.000	43.580.621.000	
314	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	
315	Kab. Banjar	19.164.000	9.982.305.040	14.937.423.000	24.900.564.000	24.900.564.000	24.900.564.000	89.639.115.000	
316	Kab. Barito Kuala	4.514.324.900	8.639.804.360	15.992.061.000	20.107.541.000	20.107.541.000	20.107.541.000	76.314.624.000	
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	9.255.926.680	12.918.284.000	14.637.075.000	18.299.372.000	18.299.372.000	18.299.372.000	69.525.131.000	
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	9.680.308.119	11.567.150.680	19.179.268.000	21.066.111.000	21.066.111.000	21.066.111.000	82.377.601.000	
319	Kab. Hulu Sungai Utara	6.652.946.100	9.120.574.900	13.385.913.000	15.853.532.000	15.853.532.000	15.853.532.000	60.946.509.000	
320	Kab. Kotawaringin	9.260.931.600	12.309.393.833	14.373.413.000	11.599.008.000	11.599.008.000	11.599.008.000	39.170.467.000	
321	Kab. Pelalawan	4.421.768.300	7.229.464.170	12.323.985.000	19.487.157.000	19.487.157.000	19.487.157.000	70.785.446.000	
322	Kab. Tanah Laut	6.550.096.000	11.051.828.020	8.825.982.000	21.287.559.000	21.287.559.000	21.287.559.000	82.362.511.000	
323	Kab. Tapin	8.867.979.962	9.805.689.949	17.780.700.000	18.719.410.000	18.719.410.000	18.719.410.000	48.809.124.000	
324	Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	73.938.930.000	

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 51 /PMK.07 /2014 TENTANG PENDAFTARAN LINTUNG
DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI
NEGERI SISI DALAM KEPADA DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TA HUN ANGGARAN 2014

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Laporan Pendapatan dan Pengeluaran								
NO	DAERAH	KEGIATAN PENGETAHUAN PNSD DI REKBER KAS UNTUK MEREKAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH	
325	Kota Bantuanmasin	19,214,300,300	30,786,871,625	37,981,294,000	49,553,866,000	49,553,866,000	1,86,642,892,000	
326	Kab. Balangan	38,490,104	7,558,378,098	679,515,000	8,199,403,000	8,199,403,000	25,277,724,000	
327	Kab. Tanah Bumbu	5,362,115,185	5,196,138,416	12,151,519,000	12,311,572,000	12,311,572,000	49,446,265,000	
328	Provinsi Kalimantan Timur	-	2,695,014,610	6,448,698,000	9,143,713,000	9,143,713,000	-	
329	Kab. Kutai Barat	-	29,945,511,287	15,419,920,000	44,852,269,000	44,852,269,000	33,879,837,000	
330	Kab. Kutai Kartanegara	513,262,680	4,958,597,900	8,563,771,000	13,207,651,000	13,207,651,000	14,9,976,727,000	
331	Kab. Kutai Barat	316,018,600	-	-	-	-	48,186,724,000	
332	Kab. Kutai Timur	74,818,295	4,444,998,485	6,810,761,000	11,180,841,000	11,180,841,000	40,353,284,000	
333	Kab. Pesisir Selatan	7,989,396,969	5,630,930,800	15,067,347,000	19,899,347,000	19,899,347,000	74,765,386,000	
334	Kota Balitpapuan	13,682,396,969	16,797,938,220	24,271,729,000	27,386,970,000	27,386,970,000	106,432,639,000	
335	Kota Batang	9,167,788,590	2,699,587,330	10,914,846,000	12,865,645,000	12,865,645,000	49,511,781,000	
336	Kota Samarinda	18,946,629,000	11,847,23,066	50,862,524,000	43,715,618,000	43,715,618,000	18,209,378,000	
337	Kab. Paser Utara	7,949,814,600	234,60,960	10,088,112,000	10,088,112,000	10,088,112,000	40,847,901,000	
338	Kab. Mahakam Utara	-	-	3,519,132,000	3,519,132,000	3,519,132,000	14,076,528,000	
339	Provinsi Kalimantan Utara	-	871,927,517	9,850,165,000	10,722,092,000	10,722,092,000	-	
340	Kab. Bulungan	30,634,800	1,515,326,214	6,000,148,000	7,484,839,000	7,484,839,000	42,016,441,000	
341	Kab. Malinau	4,837,24,700	1,016,191,520	6,629,638,000	7,156,105,000	7,156,105,000	28,454,665,000	
342	Kab. Nunukan	-	199,235,520	21,343,295,000	20,350,460,000	20,350,460,000	28,191,953,000	
343	Kota Tarakan	-	362,099,600	9,473,503,000	9,835,602,000	9,835,602,000	32,344,675,000	
344	Kab. Tambang Tidung	-	-	-	-	-	38,980,30,000	
345	Provinsi Sulawesi Utara	-	4,277,531,130	3,688,091,118	14,194,941,000	14,194,941,000	-	
346	Kab. Bolmong Mongondow	16,171,715,992	18,977,370,600	33,710,198,000	36,516,353,000	36,516,353,000	57,359,294,000	
347	Kab. Minahasa	4,855,599,818	6,159,33,362	14,448,813,000	14,448,813,000	14,448,813,000	14,329,257,000	
348	Kab. Sanggau	4,555,200	4,112,469,245	9,935,553,000	14,001,457,000	14,001,457,000	15,594,218,000	
349	Kota Bitung	18,546,183,180	24,235,560,015	33,522,771,000	39,212,147,000	39,212,147,000	51,939,914,000	
350	Kota Manado	3,399,848,800	14,286,565,476	16,305,637,000	16,305,637,000	16,305,637,000	151,159,212,000	
351	Kab. Keerom	12,921,750,240	1,284,31,160	22,393,467,000	23,758,036,000	23,758,036,000	42,265,726,000	
352	Kab. Minahasa Selatan	5,844,702,600	6,724,983,340	12,853,556,000	13,733,37,000	13,733,37,000	53,667,575,000	
353	Kota Tomohon	157,684,900	16,865,45,800	-	16,224,381,000	16,224,381,000	54,054,767,000	
354	Kab. Minahasa Utara	2,592,902,433	3,679,071,135	9,658,864,000	10,745,053,000	10,745,053,000	49,980,237,000	
355	Kab. Maros	4,820,014,300	5,939,007,202	15,126,060,000	16,245,052,000	16,245,052,000	41,894,043,000	
356	Kota Kotamobagu	1,644,260,719	2,173,617,480	5,094,170,000	5,626,527,000	5,626,527,000	63,861,216,000	
357	Kab. Bolmong Mongondow Utara	12,968,956,109	5,451,69,265	18,292,037,000	10,774,550,000	10,774,550,000	50,644,787,000	
358	Kab. Maros	9,054,000	2,731,713,640	2,510,651,000	4,291,280,000	4,291,280,000	15,384,191,000	
359	Kab. Bolmong Mongondow Selatan	1,901,730,400	1,044,129,680	3,455,235,000	2,797,634,000	2,797,634,000	12,048,137,000	
360	Provinsi Gorontalo	-	23,458,800	3,061,700,913	7,005,421,000	10,043,734,000	37,156,693,000	
361	Provinsi Sulawesi Tengah	-	7,504,000	3,531,206,610	6,694,922,000	10,218,625,000	37,350,797,000	
362	Kab. Bone	5,619,561,000	21,120,822,765	12,692,633,000	28,123,895,000	28,123,895,000	96,194,318,000	
363	Kab. Gorontalo	4,612,025,900	9,796,378,517	19,359,170,000	24,543,822,000	24,543,822,000	92,990,636,000	
364	Kota Gorontalo	-	2,338,817,300	10,687,683,000	13,026,500,000	13,026,500,000	49,767,183,000	
365	Kab. Poso	-	7,566,276,787	13,773,401,000	21,339,677,000	21,339,677,000	77,792,432,000	
366	Kab. Bone Bolango	-	1,901,730,400	2,797,634,000	2,797,634,000	12,048,137,000	-	
367	Kab. Gorontalo Utara	-	23,458,800	3,061,700,913	10,043,734,000	10,043,734,000	37,156,693,000	

**RINGKAN alokasi tunjangan profesi guru
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	DAERAH	KECURANGAN PAMBAYARAN TP. GURU PRSD	SHSA DANA TP. GURU PRSD DI KERAKA UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	(dalam ribuan)	
								JUMLAH	
415	Kab. Buton	12.249.373.966	22.862.295.000	22.786.620.000	22.786.620.000	22.786.620.000	22.786.620.000	91.222.155.000	
416	Kab. Konawe	3.365.873.600	6.049.827.393	18.311.130.000	20.995.084.000	20.995.084.000	20.995.084.000	81.296.362.000	
417	Kab. Kolaka	-	9.922.444.000	19.046.669.000	19.046.669.000	19.046.669.000	19.046.669.000	67.062.451.000	
418	Kab. Muna	13.872.765.300	11.236.578.082	34.294.324.000	31.918.137.000	31.918.137.000	31.918.137.000	130.008.735.000	
419	Kota Kendari	9.662.650.800	12.410.122.036	25.440.957.000	27.888.449.000	27.888.449.000	27.888.449.000	109.105.304.000	
420	Kota Berau	5.443.306.500	20.449.451.000	22.133.430.000	22.133.430.000	22.133.430.000	22.133.430.000	86.869.741.000	
421	Kab. Konawe Selatan	3.395.127.300	8.242.198.980	11.436.789.000	16.303.860.000	16.303.860.000	16.303.860.000	60.368.369.000	
422	Kab. Bombana	1.59.688.800	5.219.541.000	11.359.827.000	11.359.827.000	11.359.827.000	11.359.827.000	39.299.402.000	
423	Kab. Wakatobi	6.828.847.353	4.075.478.940	12.446.465.000	9.693.997.000	9.693.997.000	9.693.997.000	41.925.756.000	
424	Kab. Kolaka Utara	-	6.762.655.615	4.006.674.000	10.789.309.000	10.789.309.000	10.789.309.000	36.394.601.000	
425	Kab. Konawe Utara	6.57.905.800	1.673.773.490	3.900.215.000	4.916.053.000	4.916.053.000	4.916.053.000	18.648.374.000	
426	Kab. Buton Utara	4.782.400	1.100.304.749	4.737.263.000	5.862.785.000	5.862.785.000	5.862.785.000	22.355.621.000	
427	Kab. Kolaka Timur	-	5.907.615.000	5.907.615.000	5.907.615.000	5.907.615.000	5.907.615.000	23.630.460.000	
428	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	3.529.401.000	3.529.401.000	3.529.401.000	3.529.401.000	14.117.604.000	
429	Provinsi Bali							-	
430	Kab. Badung	13.509.245.042	15.608.896.914	31.054.266.000	33.153.920.000	33.153.920.000	33.153.920.000	130.516.028.000	
431	Kab. Bangli	4.531.624.600	7.079.773.400	15.612.539.000	18.160.658.000	18.160.658.000	18.160.658.000	70.094.513.000	
432	Kab. Buleleng	22.413.807.000	30.094.345.560	48.006.355.000	56.642.873.000	56.642.873.000	56.642.873.000	217.990.974.000	
433	Kab. Gianyar	15.59.505.400	29.708.497.000	42.669.735.000	42.669.735.000	42.669.735.000	42.669.735.000	157.117.810.000	
434	Kab. Jembrana	6.292.575.500	12.232.155.640	18.897.031.000	25.336.591.000	25.336.591.000	25.336.591.000	94.905.804.000	
435	Kab. Karangasem	11.512.221.200	11.679.009.595	34.613.101.000	34.809.890.000	34.809.890.000	34.809.890.000	139.072.771.000	
436	Kab. Klungkung	11.183.041.000	11.183.044.404	21.760.909.000	21.960.952.000	21.960.952.000	21.960.952.000	88.673.765.000	
437	Kab. Tabanan	16.331.068.000	31.441.350.675	28.067.992.000	43.207.992.000	43.207.992.000	43.207.992.000	157.721.676.000	
438	Kota Denpasar	38.359.228.500	21.450.815.480	58.344.043.000	41.255.630.000	41.255.630.000	41.255.630.000	182.110.933.000	
439	Provinsi Nusa Tenggara Barat							-	
440	Kab. Bima	9.38.370.600	7.067.021.295	28.620.845.000	34.749.496.000	34.749.496.000	34.749.496.000	132.869.333.000	
441	Kab. Dompu	7.003.525.700	5.420.450.100	18.871.104.600	17.287.920.000	17.287.920.000	17.287.920.000	70.734.806.000	
442	Kab. Lombok Barat	19.023.623.600	24.855.806.000	49.334.237.000	42.997.098.000	42.997.098.000	42.997.098.000	120.525.531.000	
443	Kab. Lombok Tengah	25.739.248.600	19.021.109.638	57.702.565.000	53.698.877.000	53.698.877.000	53.698.877.000	178.125.531.000	
444	Kab. Lombok Timur	20.202.295.360	16.195.558.240	24.856.312.000	29.754.853.000	29.754.853.000	29.754.853.000	218.799.196.000	
445	Kab. Sumbawa	13.697.226.500	30.714.855.700	12.024.275.270	16.769.763.000	16.769.763.000	16.769.763.000	115.120.871.000	
446	Kota Mataram	8.352.503.300	1.411.640.300	5.571.741.000	9.508.744.000	9.508.744.000	9.508.744.000	119.113.450.000	
447	Kota Bima	1.411.640.300	5.448.643.125	1.424.808.051	11.334.293.000	11.334.293.000	11.334.293.000	78.044.218.000	
448	Kab. Sumbawa Barat	1.935.335.600	11.334.293.000	11.334.293.000	11.223.765.000	11.223.765.000	11.223.765.000	45.005.588.000	
449	Kab. Lombok Utara	-	-	-	-	-	-	-	
450	Provinsi Nusa Tenggara Timur							-	
451	Kab. Alor	3.233.895.000	3.877.904.860	11.378.222.000	11.919.231.000	11.919.231.000	11.919.231.000	47.135.915.000	
452	Kab. Ende	12.295.654.400	6.893.709.790	14.866.131.000	9.463.177.000	9.463.177.000	9.463.177.000	42.255.682.000	
453	Kab. Ende	8.578.467.922	5.524.811.985	23.519.413.000	20.365.577.000	20.365.577.000	20.365.577.000	84.616.684.000	
454	Kab. Flores Timur	10.319.192.600	7.241.652.012	20.111.464.000	17.033.923.000	17.033.923.000	17.033.923.000	71.213.233.000	
455	Kab. Kupang	10.531.442.528	9.234.947.545	20.031.325.000	18.734.790.000	18.734.790.000	18.734.790.000	76.225.692.000	
456	Kab. Lembata	1.271.422.591	3.225.323.865	9.986.936.000	11.940.938.000	11.940.938.000	11.940.938.000	45.809.450.000	
457	Kab. Manggarai	5.398.335.800	6.628.112.655	12.912.866.000	14.142.643.000	14.142.643.000	14.142.643.000	55.340.795.000	
458	Kab. Ngada	3.563.169.700	8.775.358.000	23.737.203.000	18.722.331.000	18.722.331.000	18.722.331.000	36.221.573.000	
459	Kab. Sumba	12.161.669.050	7.146.797.023	11.213.686.000	9.663.173.000	9.663.173.000	9.663.173.000	79.904.196.000	
460	Kab. Sumba Barat	2.561.005.260	1.010.490.500	11.213.686.000	9.663.173.000	9.663.173.000	9.663.173.000	40.203.207.000	

LAMPIGAN I
REGISTRASI IDENTITAS KEGIATAN REPUBLIK
NOMOR 51 /PERK.07/2014 TENTANG PREDOMAN UNDUM
DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PROKAL
NEGERI SISI, DAERAH KEPERGURUAN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

**RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	DAERAH	KECURANGAN PAMBAYARAN TP. GURU PRSD	SHSA DANATP. GURU PRSD DI BERPENGARUH UMUM DAKWAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	(dalam ribuan)	
								JUMLAH	
461	Kab. Sumba Timur	5.510.220,400	6.297.977,435	12.638.868,000	13.426.625,000	13.426.625,000	13.426.625,000	52.918.743,000	
462	Kab. Timor Tengah Selatan	10.216.132,972	8.003.995,179	21.765.419,000	19.574.271,000	19.574.271,000	19.574.271,000	80.509.232,000	
463	Kab. Timor Tengah Utara	6.234.265,295	7.844.093,260	12.815.595,000	11.368.387,000	11.368.387,000	11.368.387,000	46.937.735,000	
464	Kota Kalabagan	15.244.007,184	14.700.322,596	32.212.210,000	31.768.524,000	31.768.524,000	31.768.524,000	127.517.782,000	
465	Kab. Rote Ndao	-	-	8.666.248,000	8.666.248,000	8.666.248,000	8.666.248,000	34.664.929,000	
466	Kab. Manggarai Barat	6.458.311,888	7.364.041,336	22.084.762,000	22.362.855,000	22.362.855,000	22.362.855,000	95.173.327,000	
467	Kab. Nagleo	5.504.573,400	5.163.872,760	11.885.050,000	11.524.349,000	11.524.349,000	11.524.349,000	46.538.097,000	
468	Kab. Sumba Barat Daya	4.793.571,300	3.646.010,640	10.501.657,000	9.354.097,000	9.354.097,000	9.354.097,000	38.563.948,000	
469	Kab. Sumba Tengah	90.898,000	1.766.750,040	2.023.158,000	3.699.020,000	3.699.020,000	3.699.020,000	13.120.218,000	
470	Kab. Manggarai Timur	7.253.518,600	(947.498.569)	18.890.381,000	10.779.363,000	10.779.363,000	10.779.363,000	51.318.470,000	
471	Kab. Sabu Rajaan	272.539,398	24.497.629,292	3.821.409,000	3.793.846,000	3.793.846,000	3.793.846,000	15.202.947,000	
472	Kab. Malaka	-	-	12.525.738,000	12.525.738,000	12.525.738,000	12.525.738,000	50.102.922,000	
473	Provinsi Maluku							-	
474	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.683.939,857	4.993.974,942	8.018.712,000	11.318.727,000	11.318.727,000	11.318.727,000	41.974.693,000	
475	Kab. Maluku Tengah	95.227,844	19.181.188,404	22.613.228,000	22.029.188,000	22.029.188,000	22.029.188,000	68.730.792,000	
476	Kab. Maluku Tenggara	1.879.631,680	3.792.386,599	6.379.211,000	8.291.965,000	8.291.965,000	8.291.965,000	31.225.109,000	
477	Kab. Pulau Buru	66.546,600	3.079.776,820	3.922.807,000	6.945.997,000	6.945.997,000	6.945.997,000	24.770.798,000	
478	Kota Ambon	166.024,840	828.216,280	3.1.832.297,000	32.494.458,000	32.494.458,000	32.494.458,000	129.315.671,000	
479	Kab. Simeulue	-	6.598.675,222	3.181.549,000	9.540.174,000	9.540.174,000	9.540.174,000	31.802.071,000	
480	Kab. Seram Bagian Barat	-	1.707.355,880	2.021.108,000	3.738.464,000	3.738.464,000	3.738.464,000	13.246.500,000	
481	Kab. Kepulauan Aru	-	119.555,300	3.616.119,000	3.735.704,000	3.735.704,000	3.735.704,000	14.823.231,000	
482	Kota Tual	1.242.805,800	2.086.856,940	6.229.993,000	7.084.045,000	7.084.045,000	7.084.045,000	27.192.128,000	
483	Kab. Maluku Barat Daya	-	4.964.508,000	4.994.508,000	4.994.508,000	4.994.508,000	4.994.508,000	19.978.032,000	
484	Kab. Buru Selatan	110.804,800	909.468,420	3.374.937,000	4.173.601,000	4.173.601,000	4.173.601,000	15.895.749,000	
485	Provinsi Maluku Utara							-	
486	Kab. Halmahera Tengah	931.964,852	1.752.002,659	5.300.752,000	6.120.789,000	6.120.789,000	6.120.789,000	23.663.119,000	
487	Kota Tentena	2.925.329,400	7.251.815,122	17.449.288,000	21.775.774,000	21.775.774,000	21.775.774,000	82.776.610,000	
488	Kab. Halmahera Barat	10.319.693,525	7.645.903,333	10.319.693,525	10.317.017,000	10.317.017,000	10.317.017,000	43.122.424,84,000	
489	Kab. Halmahera Timur	2.64.601,120	1.983.003,180	7.252.092,000	9.010.054,000	9.010.054,000	9.010.054,000	34.123.754,000	
490	Kab. Halmahera Selatan	4.192.120,500	1.043.116,507	11.655.997,000	8.487.023,000	8.487.023,000	8.487.023,000	37.097.056,000	
491	Kab. Halmahera Utara	5.186.970,000	6.677.700,000	9.156.194,000	9.156.194,000	9.156.194,000	9.156.194,000	34.147.182,000	
492	Kab. Kepulauan Sula	4.202.692,090	1.096.364,546	1.4.512.747,000	11.406.419,000	11.406.419,000	11.406.419,000	48.722.004,000	
493	Kota Bitung Kepulauan Sula	4.417.838,500	7.060.483,259	7.179.605,000	10.362.250,000	10.362.250,000	10.362.250,000	38.805.355,000	
494	Kab. Maluku Utara	555.643,320	1.646.913,980	1.885.310,000	2.986.581,000	2.986.581,000	2.986.581,000	10.955.053,000	
495	Kab. Pelosia Taliabu	-	-	4.765.710,000	4.765.710,000	4.765.710,000	4.765.710,000	19.062.810,000	
496	Provinsi Papua							-	
497	Kab. Biak Numfor	3.877.653,100	4.204.554,020	8.403.892,000	8.730.793,000	8.730.793,000	8.730.793,000	34.595.271,000	
498	Kab. Jayawijaya	489.154,000	3.401.778,160	9.865.523,000	12.778.947,000	12.778.947,000	12.778.947,000	48.199.964,000	
499	Kab. Jayawijaya	-	-	12.501.920,000	12.501.920,000	12.501.920,000	12.501.920,000	50.007.680,000	
500	Kab. Merauke	690.699,380	6.454.262,300	8.009.105,000	13.772.669,000	13.772.669,000	13.772.669,000	49.327.113,000	
501	Kab. Mimika	-	-	7.752.729,000	7.752.729,000	7.752.729,000	7.752.729,000	31.170.916,000	
502	Kab. Nabire	5.746.902,500	2.743.478,110	13.789.105,000	10.785.580,000	10.785.580,000	10.785.580,000	46.146.115,000	
503	Kab. Poso	-	4.268.374,120	-	643.547,000	643.547,000	643.547,000	6.101.591,000	
504	Kab. Parciale Jayawa	51.840,000	4.080.967,000	4.080.967,000	4.080.967,000	4.080.967,000	4.080.967,000	16.122.868,000	
505	Kab. Kepulauan Yapen	1.690.600,200	637.849,042	28.457.249,000	27.414.498,000	27.414.498,000	27.414.498,000	26.009.497,000	
506	Kota Jayapura	-	-	-	-	-	-	110.710.743,000	

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 51/T/PER/07/2014 TENTANG PERDAMAN UNGUID
DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PROVINSI,
NEGARI SIPIL, CAIRAH GEPADA DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

**RINCIAN alokasi tunjangan profesi guru
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	DAERAH	KECURANGAN PRAKBAYARAN TP. GURU PRSID	SHSA DANATP. GURU PRSID DI KERENGAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I		PENYALURAN TRIWULAN II		PENYALURAN TRIWULAN III		PENYALURAN TRIWULAN IV	
				(dalam ribuan)	JUMLAH	(dalam ribuan)	JUMLAH	(dalam ribuan)	JUMLAH	(dalam ribuan)	JUMLAH
507	Kab. Samarinda	-	1.842.836,100	1.448.210,698	-	2.748.778,000	-	2.748.778,000	-	2.748.778,000	10.995.112,000
508	Kab. Keerom	-	-	6.006.512,000	-	5.611.886,000	-	5.611.886,000	-	5.611.886,000	22.842.170,000
509	Kab. Yabuloimo	-	-	3.306.403,000	-	3.306.403,000	-	3.306.403,000	-	3.306.403,000	13.225.612,000
510	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	3.201.144,000	-	3.201.144,000	-	3.201.144,000	-	3.201.144,000	12.804.576,000
511	Kab. Tololela	-	-	2.660.822,000	-	2.660.822,000	-	2.660.822,000	-	2.660.822,000	10.643.280,000
512	Kab. Boiron Digoel	-	-	3.142.410,000	-	3.142.410,000	-	3.142.410,000	-	3.142.410,000	12.569.640,000
513	Kab. Manggarai	745.601.996	3.42.038.926	12.165.780,000	-	11.762.217,000	-	11.762.217,000	-	11.762.217,000	47.452.431,000
514	Kab. Asmat	-	-	3.849.199,000	-	3.849.199,000	-	3.849.199,000	-	3.849.199,000	15.195.796,000
515	Kab. Waropen	-	-	5.963.871,000	-	5.963.871,000	-	5.963.871,000	-	5.963.871,000	23.875.480,000
516	Kab. Supiori	-	-	9.810.961,000	-	9.810.961,000	-	9.810.961,000	-	9.810.961,000	39.243.844,000
517	Kab. Mambarante Raya	-	-	2.961.947,000	-	2.961.947,000	-	2.961.947,000	-	2.961.947,000	11.807.788,000
518	Kab. Mambarante Tengah	-	-	10.488.355,000	-	10.488.355,000	-	10.488.355,000	-	10.488.355,000	41.953.420,000
519	Kab. Yalimo	-	-	6.615.752,000	-	6.615.752,000	-	6.615.752,000	-	6.615.752,000	26.483.008,000
520	Kab. Lanny Jaya	-	-	17.846.794,000	-	17.846.794,000	-	17.846.794,000	-	17.846.794,000	71.187.176,000
521	Kab. Obulسا	-	-	3.376.790,000	-	3.376.790,000	-	3.376.790,000	-	3.376.790,000	13.507.160,000
522	Kab. Poso	-	-	6.069.727,000	-	6.069.727,000	-	6.069.727,000	-	6.069.727,000	24.278.908,000
523	Kab. Paracatu	-	-	4.019.008,000	-	4.019.008,000	-	4.019.008,000	-	4.019.008,000	16.076.032,000
524	Kab. Bitung Jaya	-	-	2.776.093,000	-	2.776.093,000	-	2.776.093,000	-	2.776.093,000	11.104.372,000
525	Kab. Deliay	-	-	3.776.492,000	-	3.776.492,000	-	3.776.492,000	-	3.776.492,000	15.105.968,000
526	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	Kab. Fakfak	1.511.102,450	911.459,000	8.803.859,000	-	8.204.126,000	-	8.204.126,000	-	8.204.126,000	33.416.237,000
528	Kab. Manokwari	-	1.388.970,200	8.978.284,000	-	10.367.254,000	-	10.367.254,000	-	10.367.254,000	40.040.046,000
529	Kab. Sorong	1.727.114,700	2.049.263.380	15.243.663,000	-	15.569.812,000	-	15.569.812,000	-	15.569.812,000	61.953.099,000
530	Kota Sorong	1.949.223,700	3.019.14,100	14.272.971,000	-	15.342.872,000	-	15.342.872,000	-	15.342.872,000	60.301.587,000
531	Kab. Raja Ampat	1.83.124,700	(258.154.729,0)	4.133.232,000	-	3.691.912,000	-	3.691.912,000	-	3.691.912,000	15.208.968,000
532	Kab. Sorong Selatan	578.427,000	1.166.527,940	9.754.837,000	-	10.354.963,000	-	10.354.963,000	-	10.354.963,000	40.829.786,000
533	Kab. Teluk Bintuni	-	182.496.360	5.640.751,000	-	5.823.248,000	-	5.823.248,000	-	5.823.248,000	23.110.498,000
534	Kab. Teluk Wondama	23.172.300	470.034.200	5.559.543,000	-	6.006.406,000	-	6.006.406,000	-	6.006.406,000	23.578.758,000
535	Kab. Kofmarina	10.501.600	18.191.058,000	18.191.058,000	-	19.422.242,000	-	19.422.242,000	-	19.422.242,000	76.437.784,000
536	Kab. Mamberamo	589.860.160	(434.191.200)	6.477.959,000	-	5.453.908,000	-	5.453.908,000	-	5.453.908,000	22.349.683,000
537	Kab. Tambrauw	35.973,400	161.357.800	1.559.075,000	-	1.461.744,000	-	1.461.744,000	-	1.461.744,000	5.944.307,000
538	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	1.4.221.905,000	-	1.4.231.905,000	-	1.4.231.905,000	-	1.4.231.905,000	56.937.620,000
539	Kab. Manokwari Selatan	-	-	2.265.385,000	-	2.265.385,000	-	2.265.385,000	-	2.265.385,000	9.065.540,000
	TOTAL PROVINSI	163.082.365,755	219.070.077,705	401.378.716,000	-	457.366.428,000	-	457.366.428,000	-	457.366.428,000	1.773.478.000,000
	TOTAL KABUPATEN/KOTA	4.147.664.999,655	5.849.581.278,075	12.353.431.292,000	-	14.008.005.394,000	-	14.008.005.394,000	-	14.008.005.394,000	54.362.838.551,000
	TOTAL NASIONAL	4.310.747.365,410	6.068.651.355,780	12.754.810.008,000	-	14.465.126.882,000	-	14.465.126.882,000	-	14.465.126.882,000	56.136.316.551,000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

MOHAMAD CHATIB BASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61 /PMK.07/2014
TENTANG PEDOMAN UNTUK DAN ALOKASI TUNJANGAN
PROFESI GURU PNSD KEPADA DAERAH
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

**JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK DAN TELAH MENERIMA
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD SEMESTER PERTAMA TA. 2014**

TRIWULAN I

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : JANUARI 2014			BULAN : FEBRUARI 2014			BULAN : MARET 2014			TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	(7)	(8) = (3)+(5)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(7)			
TK									Transfer Dana dari Pusat Rp	(a)	
SD									Realisasi Pembayaran Rp	(b)	
SMP									Sisa Lebih / (kurang) Rp	(c) = (a - b)*	
SLB											
SMA											
SMK											
Pengawas											
JUMLAH									$\Sigma \text{Rp} (b)$		

TRIWULAN II

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : APRIL 2014			BULAN : MEI 2014			BULAN : JUNI 2014			TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	(7)	(8) = (3)+(5)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(7)	Transfer Dana dari Pusat Rp	(d)	
TK									Realisasi Pembayaran Rp	(c)	
SD									Sisa Lebih / (kurang) Rp	(e)	
SMP											
SLB											
SMA											
SMK											
Pengawas											
JUMLAH									$\Sigma \text{Rp} (e)$		

Keterangan :

- (a) dan (d) adalah jumlah dana yang ditransfer pada Triwulan I dan II
- Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d Juni) dan Semester II (Juli s.d Desember).
- Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

Tempat,

Kepala Daerah

ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61 /PMK.07/2014
TENTANG PEDOMAN UJUD DAN alokasi tunjangan profesi
GURU PNSD KEPADA DERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK NAMUN BELUM MENERIMA
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD SEMESTER PERTAMA TA. 2014

TRIWULAN I

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : JANUARI 2014		BULAN : FEBRUARI 2014		BULAN : MARET 2014		TOTAL KEKURANGAN PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(5)+(7)	
TK								
SD								
SMP								
SLB								
SMA								
SMK								
Pengawas								
JUMLAH							Σ Rp	

TRIWULAN II

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : APRIL 2014		BULAN : MEI 2014		BULAN : JUNI 2014		TOTAL KEKURANGAN PEMBAYARAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(5)+(7)	
TK								
SD								
SMP								
SLB								
SMA								
SMK								
Pengawas								
JUMLAH							Σ Rp	

Keterangan :		Tempat,
1. Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).		Kepala Daerah
2. Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.	ttd Nama Jelas	MENTERI KEUANGAN, MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUJANGAN NOMOR 61 /PMK/07/2014
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI
GURU PNSD KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN
KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD SEMESTER I TA. 2014
BESERTA PENJELASAN KELEBIHAN/KEKURANGAN DANA*

Provinsi/Kab/Kota:

PENYALURAN KE KAS DAERAH	REALISASI PEMBAYARAN OLEH KAS DAERAH **)	SISA DANA	POTONGAN PPh Psj1.21		KEKURANGAN PEMBAYARAN (jika ada) ***)	
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN I	TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1)+(2) - (3)+(4)	(6)	(7)
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) jumlahnya sama dengan kolom (8) pada FORM 1 (Format Realisasi Pembayaran)

***) jumlahnya sama dengan kolom (8) pada FORM 2 (Format Kekurangan Pembayaran)

1. Format laporan tersebut dia tas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).
2. Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUJANGAN,
MUTHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61 /PMK.07/2014
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI
GURU PNSD KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

PERHITUNGAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH
(REKAPITULASI SISA DANA)

Provinsi/Kab/Kota:

NO (1)	TAHUN (2)	ALOKASI SESUAI PMK (3)	REALISASI* (4)	KEBUTUHAN PEMBAYARAN** (5)	SALDO*** (6) = (3) - (4)	KURANG/LEBIH (7) = (5) - (3)	KETERANGAN
1	2010						
2	2011						dapat ditambahkan keterangan yang dianggap penting
3	2012						
4	2013						
5	2014						

Keterangan:

* Realisasi Penyuburan Tunjangan Profesi Guru PNSD sampai dengan Triwulan Keempat

**) Jumlah kebutuhan pendanaan penyuburan Tunjangan Profesi Guru PNSD selama 1 (satu) tahun.

***) Jumlah sisa dana setelah pembayaran Triwulan Keempat yang masih disimpan di Kas Umum Daerah.

Tempat,.....

Kepala Daerah

ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD
KEPADА DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN
ANGGARAN 2014

**DAFTAR RENCANA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL
ATAS TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD TAHUN 2014**

Provinsi/Kab/Kota:

NO.	BULAN	JUMLAH GURU PNSD		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Tarif PPh Ps1.21	PEMOTONGAN PPh Ps1.21	KETERANGAN
		Colongan	Jumlah Guru				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) x (6)	(8)
1.	JANUARI	Gol. III	Rp.....	5%	Rp.....	dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
		Gol. IV	Rp.....	15%	Rp.....	
2.	FEBRUARI	Gol. III	Rp.....	5%	Rp.....	dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
		Gol. IV	Rp.....	15%	Rp.....	
3.	MARET	Gol. III	Rp.....	5%	Rp.....	dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
		Gol. IV	Rp.....	15%	Rp.....	
...dist.	...dist.	...dist.	...dist.	...dst.	...dst.	...dst.	Tempat, Format laporan tersebut adalah untuk laporan perkiraan pemotongan Pajak PPh Ps1.21 Tahun 2014
12.	DESEMBER	Gol. III	Rp.....	5%	Rp.....	Tempat, Format laporan tersebut adalah untuk laporan perkiraan pemotongan Pajak PPh Ps1.21 Tahun 2014
		Gol. IV	Rp.....	15%	Rp.....	
	JUMLAH		Σ Rp.....	Σ Rp.....	Σ Rp.....	Σ Rp.....	

Keterangan:

Format laporan tersebut adalah untuk laporan perkiraan pemotongan Pajak PPh Ps1.21 Tahun 2014

ttd

Nama jelas

MENTERI KEUANGAN,

MUHAMAD CHATIB BASRI